



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591043, 591218, 591213, 591214, 591082

(PABX) Telex 25644 Fax 591187

BANJARNEGARA 53414

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 028. 1 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banjarnegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan ini menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara,
Pada tanggal 11 September 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kabupaten Banjarnegara


R. RIONO RAHADI PRASETYO, S.H., M.H.,

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Banjarnegara
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu 26 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
1	Password Aplikasi Sistem	UU No. 14/2008	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi jalur/ berita komunikasi
2	Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Berkas pemeriksaan (Kinerja & PDDT)	UU No. 14/2008	UU Kearsipan	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
3	Surat Pengaduan yang diterima Inspektorat	UU No. 14/2008	UU Kearsipan	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
4	Disposisi/ Rekomendasi/ Perintah dari Atasan untuk melakukan pemeriksaan/ pembinaan	UU No. 14/2008	UU Kearsipan	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
5	Nota Dinas atas suatu permasalahan tertentu yang bersifat rahasia	UU No. 14/2008	UU Kearsipan	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
6	Data Pegawai yang akan dilantik dan atau dimutasi	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik ps1 17 h -UU No 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara	Sampai dengan pelantikan dan atau SK mutasi pegawai	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan data secara prematur	Melindungi proses penyusunan kebijakan penataan ASN
7	Data Profil pegawai beserta keluarga	UU KIP Pasal 17 point a,h,i	Selama menjadi ASN	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi rahasia pegawai
8	Data pegawai mendapat hukuman disiplin	UU KIP Pasal 17 point a,h,i	Selama menjadi ASN	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi rahasia pegawai
9	Data Pegawai yang sedang menjalani proses perceraian	UU KIP Pasal 17 point a,h,i	Selama menjadi ASN	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi rahasia pribadi
10	Data Hasil Medical Cek Up	UU KIP Pasal 17 point a,h,i	Selama menjadi ASN	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi rahasia pribadi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
11	Data Hasil evaluasi Penilaian Pengajar dan peserta diklat	UU KIP Pasal 17 point a,h,i	Selama berlaku	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi rahasia pegawai
12	Data nilai Diklatpim/Proper	UU KIP Pasal 17 point a,h,i	Selama berlaku	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi rahasia pegawai
13	Full Paper/book Laporan Proyek Perubahan	UU KIP Pasal 17 point a,h,i	Selama berlaku	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi rahasia pegawai
14	Hasil Rekomendasi Assesment	UU KIP Pasal 17 point a,h,i	Selama berlaku	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi proses penyusunan kebijakan penataan ASN
15	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi berupa hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pemerintah daerah	Melindungi rahasia pribadi berupa hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pemerintah daerah
16	Data Pembayaran Oleh Wajib Pajak	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi berupa kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Melindungi rahasia pribadi berupa kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang
17	Data Sertifikat Tanah Milik Daerah	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi berupa kondisi aset pemerintah daerah	Melindungi rahasia pribadi berupa kondisi aset pemerintah daerah
18	Data BPKB Kendaraan Milik Daerah	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi berupa kondisi aset pemerintah daerah	Melindungi rahasia pribadi berupa kondisi aset pemerintah daerah
19	Data Kerugian Daerah (TPTGR)	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi berupa kondisi kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Melindungi rahasia pribadi berupa kondisi kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang
20	Server	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/badan publik.	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
21	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika guru, pegawai, dan siswa	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
22	Biodata guru, pegawai, siswa, serta mitra kerjasama	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
23	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
24	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
25	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
26	Soal, jawaban, nilai ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat / KKN	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
27	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
28	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
29	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat membahayakan pethananan dan keamanan negara/badan publik.	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
30	Soal,jawaban,nilai tes ujian masuk	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat / KKN	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
31	Data piutang, gaji dan tunjangan guru dan pegawai	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
32	Proposal penelitian	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
33	Dokumen pengajuan ijin perkawinan/perceraian	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
34	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
35	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
36	Dokumen/arsip riwayat studi siswa	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
37	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
38	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata uaha negara, dan agama	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
39	Evaluasi organisasi dan tata kerja	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
40	Dokumen kepemilikan tanah	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengungkap rahasia Badan publik	Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan
41	Hasil pemeriksaan keuangan reguler	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
42	Laporan keuangan tahun berjalan	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
43	Laporan pelaksanaan anggaran	Pasal 17 UU KIP	Selama aturan memperbolehkan untuk di buka / ada persetujuan ybs.	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
44	Data Pembinaan penjual minuman keras beralkohol	UU No. 14 Tahun 2008	Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia penjual miras	Melindungi rahasia penjual minuman keras beralkohol
45	Lokasi server	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25.	Tidak terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya tindak kriminal pengrusakan, pencurian data dan Penyalahgunaan hak akses	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi data dan perangkat yang ada serta melindungi operator.
46	Internet Protocol/IP Address Private	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25.	Tidak terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya penyalahgunaan hak akses.	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi hak akses
47	Bandwidth Management	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25.	Tidak terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
48	Data Frekuensi Komunikasi Mikrotik	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25.	Tidak terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jalur komunikasi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
49	Kode Akses Elektronik	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25.	Tidak terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jalur komunikasi
50	Sistem Keamanan Elektronik	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1.	Tidak terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jalur komunikasi
51	Kunci Sistem Sandi	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1.	Tidak terbatas	- Dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
52	Berita/Radiogram Rahasia	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1.	Tidak terbatas	- Dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
53	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1.	Tidak terbatas	- Dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
54	Identitas Aduan	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 a dan h, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1.	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kepentingan proses penegakan hokum - Dapat mengungkap rahasia pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan proses penegakkan hukum - Melindungi rahasia pribadi
55	Menara Telekomunikasi	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1.	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jalur komunikasi
56	Diposisi Pimpinan	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. infromasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
57	Nota Dinas	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. infromasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
58	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. infromasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
59	Arsip/dokumen nota dinas, memo pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaanya	- UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. infromasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
60	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. infromasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
61	Data rekaman KTP, KK ataupun data pelayanan lainnya	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.c. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak terbatas	Menjadi sumber informasi bagi orang-orang tak bertanggungjawab untuk dimanfaatkan/menguntungkan kepentingan pribadi/lembaga semisal LSM	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
62	Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama Berlaku	- Akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Karena ada beberapa informasi yang dikecualikan karena apabila dibuka, dikhawatirkan akan menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan
63	Identitas Penderita HIV/AIDS	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 57) 2. Permenkes no 21 tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS bagian ke empat pasal 21, pasal 31 (registrasi fasilitas) 3. Perda Kabupaten Banjarnegara No 13 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten Banjarnegara Pasal 11 ayat 4	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, ada stigma dan pengucilan penderita oleh masyarakat terkait penyakit yang dideritanya, Potensi menimbulkan kerawanan/kekhawatiran masyarakat	Melindungi kerahasiaan, menjaga dari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, menjaga stigma dan pengucilan penderita dan menjaga kerawanan/kekhawatiran masyarakat
64	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	1. UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 47 2. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 huruf I 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 pasal 10	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan, menjaga dari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
65	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. UUD 1945 pasal 28 A dan B 2. UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
66	Biodata Pribadi Aparatur Sipil Negara terkait data pribadi.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d.	Tanpa Batas	Rahasia Aparatur Sipil Negara diketahui pihak lain sehingga mengganggu privasi	Rahasia Aparatur Sipil Negara Terjaga
67	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 19.	Tidak terbatas/ kecuali ada permintaan instansi yang berwenang	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUALIAN	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7.			
68	Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17.	Tidak terbatas/kecuali ada permintaan dari pihak yang berwenang	Terganggunya Rahasia Keuangan Negara	Rahasia Keuangan Negara terjaga

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 19.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7.</p>			
69	Dokumen internal tentang penyelesaian kasus yang belum final	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.	Tidak terbatas/ kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengatur	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses hukum

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
 Waktu : Pukul. 08.30 - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Binkominfo Banjarmasin
 Acara : Rapat Uji Konsekuensi Informasi Yang dikevaluasi
 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2023

NO	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	R. Riono R. P., SH, M.H.	Ka Binkominfo	L	1.....
2	KHADIR	Kabid Inpolcom	L	2.....
3	FaZira	Asst Inpolcom	P	3.....
4	Tika	"	P	4.....
5	Tutus Bryanto	Koord. Keri Pel.lean	L	5.....
6	Helmiyah.	Bang. Remetaku.	P	6.....
7	Hilwanda R.L.U.	Disorpus BNA	P	7.....
8	Dhany Reza H	— U —	L	8.....
9	Edy Wibowo	BKD	L	9.....
10	DMi Anshari M	BPPKAD	P	10.....
11	Au Polupi	Bag. Hulfam	P	11.....
12	Intan Fitriawati	Kec. Pwj. Iclanpola	P	12.....
13	Gah	Satpol	L	13.....
14	Risma Puri	Satpol	P	14.....
15	Mur F.	Bndi lgr	L	15.....
16	Deddy Kurniawan	Dinkes	L	16.....
17	A. Sholih P.		P	17.....
18	Sartika	Kominfo	P	18.....
19	Adira Faekhatul R.	Kominfo	P	19.....
20	Revaisha PUTRA L	KOMINFO	P	20.....

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.